

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan diteliti adalah: 1). Bagaimana kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ? 2). Bagaimana kendala rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya ? 3). Bagaimana kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika dimasa yang akan datang dari kajian Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat. Metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1). Melihat ketentuan pidana Pasal 127 ayat (2) dan (3), dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan Pasal-Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu dan korban penyalah guna narkotika dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman. 2). Kendala-kendala yang berasal dari pemerintah ini oleh disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kendala, yaitu: belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalah guna narkotika untuk melakukan rehabilitasi, masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, terjadinya perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik, terjadi masalah eksekusi. Sedangkan solusi dari kendala adalah : Perlu segera ditetapkan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban-korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi, Pemerintah harus memiliki dana ekstra untuk membiayai semua putusan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, Pemerintah harus memiliki sekala prioritas untuk masalah rehabilitasi, Penyidik dan aparat yang berwenang dalam penanganannya perlu lebih teliti dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan punya bukti yang akurat, Masalah eksekusi harus lebih diperhatikan dari sejauhmana bentuk pelanggaran. 3). Penegakan hukum UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab.

Kata Kunci : Kebijakan Rehabilitasi, Narkotika, Rehabilitasi.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Rehabilitation Policy for Narcotics Users A Study of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics". Based on the description in this thesis, the problems to be examined are 1). What is the policy of the social rehabilitation program for drug users that have been regulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics? 2). What are the obstacles to social rehabilitation for drug users and the efforts made to deal with it? 3). What is the policy of the social rehabilitation program for drug users in the future from the review of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics?

This research method uses descriptive qualitative method which is a study that aims to describe or study the facts and analyze data obtained systematically, factually and accurately. The method of using it uses normative juridical.

The results of the study concluded that: 1). Looking at the criminal The results of the study concluded that: 1). Looking at the criminal provisions of Article 127 paragraph (2) and (3), it can be concluded that the judges in deciding the cases mentioned in Article 127 paragraph (1) are obliged to pay attention to the Articles governing rehabilitation provisions so that later addicts and narcotics abusers can in rehabilitation both medical rehabilitation and social rehabilitation and are no longer sentenced to prison or imprisonment because the rehabilitation is counted as a period of serving a sentence. 2). These obstacles originating from the government stated that there were 5 (five) obstacles, namely: there was no specific place for addicts or victims of narcotics abuses to make rehabilitation, the issue of rehabilitation costs for convicted drug abuse cases, there was no rehabilitation institutions appointed by the Government, differences in information between defendants, witnesses and criminal laboratory results, execution problems occur. Whereas the solution to the obstacles is: It needs to immediately establish a special place for addicts and victims of narcotics abuse to conduct rehabilitation, the Government must have extra funds to finance all rehabilitation decisions for victims of narcotics abuse, the Government must have a priority scale for the problem of rehabilitation, Investigators and the authorities in charge of handling it need to be more careful in handling the problem of narcotics abuse and have accurate evidence, the problem of execution must be considered more than the extent of the form of the violation. 3). UU's law enforcement Number 35 of 2009 concerning ideal Narcotics must be accompanied by the awareness that law enforcement as part of the legal subsystem, is also a social subsystem so that environmental influences are quite influential on the principles of law enforcement and legal principles that apply in the national environment civilized nation.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Rehabilitation Policy.